



Mengincar Jatah Sekolah Favorit

● Banyak Orang Mampu Masuk Data KMS

YOGYA, TRIBUN - Dinas Sosial (Dinsos) Kota Yogyakarta berencana untuk memasukkan kriteria baru untuk pendaftar Kartu Menuju Sehat (KMS). Hal tersebut sebagai antisipasi banyak warga dari keluarga mampu yang meminta dimasukkan dalam data KMS, untuk tujuan pendidikan anak.

"Banyak warga mampu yang kami temukan masuk dalam daftar KMS supaya mendapat jatah kuota untuk anaknya bisa masuk sekolah negeri. Ini banyak yang seperti ini," kata Kepala Dinsos.

● ke halaman 14

Mengincar Jatah

● Sambungan Hal 13

Hadi Muchtar, Minggu (8/1). Modus-modus ini digunakan karena jika para keluarga mampu ini masuk dalam daftar penerima KMS, maka akan jauh lebih mudah mendapat kuota sekolah favorit negeri. Di samping itu, mereka juga mengincar kemudahan untuk akses mendapat jatah di sekolah favorit.

Tentu saja, nilai yang dilihat untuk siswa KMS dan non-KMS akan berbeda. Hadi mencontohkan, jika di salah satu sekolah favorit mensyaratkan ada nilai rata-rata sembilan, namun karena masuk KMS, maka nilai tujuh pun tetap bisa masuk. "Biasanya, mereka menitipkan juga pada saudaranya yang masuk dalam KMS," ulasnya.

Baru-baru ini, pihaknya juga mencoret sedikitnya 1.462 kepala keluarga (KK) yang diusulkan melalui Rukun Warga (RW) dan Rukun Warga (RW). Dari usulan sebanyak 5.520 KK, akhirnya hanya 3.058 KK yang lolos dan tercatat sebagai penerima KMS di tahun 2017.

Adapun untuk tahun ini, ada 18.651 KK yang mendapat KMS. Jumlah tersebut turun jika dibandingkan data 2016, yang tercatat 18.730 KK. Hadi menambahkan, dari jumlah tersebut terbagi atas tiga golongan KMS. Yakni, KMS 1 yang digunakan oleh fakir miskin sebanyak 17 orang, KMS 2 atau golongan miskin sebanyak 5.308, serta KMS 3 yang

dipergunakan oleh rentan miskin sebanyak 13.326 KK. "Kebanyakan dari mereka tidak lolos verifikasi karena tidak memenuhi kriteria penerima KMS," urainya.

Kriteria baru

Sebagai antisipasi adanya data titipan tersebut, pihaknya tengah menyiapkan kajian mengenai parameter baru yang digunakan untuk menentukan penerima KMS. Nantinya, untuk penerima KMS akan mendapat kriteria baru, sehingga akan memperkecil warga yang memaksakan untuk masuk dalam daftar penerima KMS.

"Usulan kriteria baru ini, nantinya akan disampaikan kepada wali kota definitif setelah ditetapkan tahun ini," paparnya.

Adapun indikator yang saat ini dipakai ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 244/KEP/2012. Dalam keputusan tersebut ditetapkan tujuh aspek penilaian yang meliputi pendapatan dan aset, papan, pangan, sandang, kendaraan, pendidikan dan sosial. Dari tujuh aspek tersebut kemudian ditetapkan 17 parameter penilaian.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Edy Herti Suasana memastikan pemangkasan jaminan pendidikan daerah (JPD) tidak berdampak pada warga miskin pemegang KMS. Khusus untuk JPD memang ada pemangkasan cukup signifikan yakni dari Rp35 miliar menjadi sekitar Rp33 miliar.

"Pemangkasan anggaran

an JPD itu, nantinya pada bantuan biaya tunggakan sekolah bagi warga miskin non-KMS. Sedangkan alokasi JPD bagi siswa dari keluarga pemegang KMS tidak dipangkas," katanya.

Disdik wajib tolak

Kalangan legislatif membenarkan adanya praktik warga yang mengejar untuk masuk dalam daftar KMS untuk kepentingan tertentu. Kepentingan memperoleh kuota sekolah favorit negeri pun memang menjadi sebuah incaran.

Maka dari itu, pihak DPRD setempat mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) dalam hal ini Dinas Sosial untuk mengantisipasi data tersebut. Salah satunya adalah melakukan pendataan cermat pada data KMS yang diusulkan.

"Di samping itu, Dinas Pendidikan juga wajib menolak siswa yang baru belakangan dimasukkan dalam kartu keluarga penerima KMS. Biasanya, modusnya adalah memasukkan saudara ke dalam kartu keluarga penerima KMS," kata Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Agung Damar Kusumandaru.

Dia tidak menampik, saat ini mayoritas warga mengejar masuk dalam daftar penerima KMS karena alasan pendidikan dan santunan kematian. Apalagi, untuk persoalan kesehatan saat ini sudah di-cover Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-BPJS Kesehatan. Sebagai antisipasi, pihaknya pun akan membahas regulasi ke depan agar tidak ada modus-modus semacam ini. (ais)

1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Sosial			

Yogyakarta, 31 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005